

INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
SUMBER DANA : **APBD** Provinsi Sumatera Selatan  
TRIWULAN : I

## LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

# FORM APBD

APBD Provinsi :

- a. Disampaikan Kepala Perangkat Daerah Provinsi kepada :
  - Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Bappeda provinsi
- b. Disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Kepada :
  - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas RI
  - Menteri Keuangan RI
  - Menteri Dalam Negeri RI
  - Gubernur Sumatera Selatan dan Instansi terkait

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN  
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN APBN TRIWULAN I  
TAHUN ANGGARAN 2025  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**I. PENDAHULUAN**

a. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraannya roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram dan tertib.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang mengemban tugas dan fungsi yang diatur dalam Perda No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan. Dalam mendukung tujuan ***"Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan"***.

1. Tujuan

Berdasarkan misi yang telah di uraikan diatas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

- a) Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b) Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.
- c) Meningkatkan Pembinaan Perlindungan Masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang ditetapkan. Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran strategis satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

- a) Berkurangnya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b) Terciptanya suasana lingkungan Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Selatan yang Tertib dan Tentram.
- c) Meningkatnya Kecukupan Anggota Sat. LINMAS dan Pos kamling.
- d) Meningkatnya keamanan lingkungan.

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN  
a. Belanja Perangkat Daerah

Total Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 40.687.783.398,-** yang terdiri atas :

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Belanja Operasional</b>        | <b>:Rp. 39.981.160.988,-</b> |
| Belanja Pegawai                   | :Rp. 27.211.971.000,-        |
| Belanja Barang dan Jasa           | :Rp. 12.769.189.988,-        |
| <b>Belanja Modal</b>              | <b>:Rp. 706.622.410,-</b>    |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | :Rp. 306.622.410,-           |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | :Rp. 400.000.000,-           |

b. Program dan Anggaran APBD

Belanja Langsung tersebut terdiri atas 3 Program 11 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

| NO         | Program/ Kegiatan                                                                     | Pagu (Rp)             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                                     | 7                     |
| <b>A</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                          | <b>37.095.126.808</b> |
| <b>I</b>   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>300.000.000</b>    |
| 1          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 115.000.000           |
| 2          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 90.000.000            |
| 3          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 95.000.000            |
| <b>II</b>  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>32.449.947.000</b> |
| 4          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 27.211.971.000        |
| 5          | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 4.569.136.000         |
| 6          | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 468.840.000           |
| 7          | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 100.000.000           |
| 8          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 100.000.000           |
| <b>III</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>970.000.000</b>    |
| 9          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 400.000.000           |
| 10         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 200.000.000           |
| 11         | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 200.000.000           |
| 12         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 170.000.000           |
| <b>IV</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>1.458.179.808</b>  |

|             |                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                    | 80.000.000           |
| 14          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                        | 61.622.410           |
| 15          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                    | 120.000.000          |
| 16          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                             | 107.750.000          |
| 17          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                            | 20.000.000           |
| 18          | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                           | 100.000.000          |
| 19          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                | 968.807.398          |
| <b>V</b>    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                                             | <b>50.000.000</b>    |
| 20          | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                     | 50.000.000           |
| <b>VI</b>   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                         | <b>272.000.000</b>   |
| 21          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                      | 7.000.000            |
| 22          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                             | 265.000.000          |
| <b>VII</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                        | <b>1.595.000.000</b> |
| 23          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                     | 840.000.000          |
| 24          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                            | 325.000.000          |
| 25          | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                     | 30.000.000           |
| 26          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                  | 200.000.000          |
| 27          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                        | 200.000.000          |
| <b>B</b>    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                         | <b>2.835.000.000</b> |
| <b>VIII</b> | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                             | <b>1.815.000.000</b> |
| 28          | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                          | 20.000.000           |
| 29          | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat                                                                                                             | 300.000.000          |
| 30          | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi                                                                                                                          | 20.000.000           |
| 31          | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 575.000.000          |
| 32          | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | 300.000.000          |
| 33          | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                               | 300.000.000          |
| 34          | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                  | 300.000.000          |
| <b>IX</b>   | <b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>                                                                                                   | <b>670.000.000</b>   |
| 35          | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                       | 200.000.000          |

|           |                                                                                                                                                                                        |                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 36        | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                 | 150.000.000           |
| 37        | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                    | 200.000.000           |
| 38        | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                       | 20.000.000            |
| 39        | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                    | 100.000.000           |
| <b>X</b>  | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>                                                                                                                         | <b>350.000.000</b>    |
| 40        | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                                                 | 130.000.000           |
| 41        | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                    | 145.000.000           |
| 42        | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                                                                                                                  | 75.000.000            |
| <b>C</b>  | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                                                                       | <b>757.656.590</b>    |
| <b>XI</b> | <b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>                                                                                                                                | <b>757.656.590</b>    |
| 43        | Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran                                                                                                                    | 75.000.000            |
| 44        | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                                                                        | 100.000.000           |
| 45        | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                      | 150.000.000           |
| 46        | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 200.000.000           |
| 47        | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran    | 100.000.000           |
| 48        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                            | 132.656.590           |
|           | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                           | <b>40.687.783.398</b> |

c. Program dan Anggaran APBN

Sedangkan total pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024/2025 sebesar **Rp. 0,-** (nihil).

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPD)

Sesuai dengan target yang tercantum pada RPD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan;
- Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan;
- Persentase Satlinmas yang aktif;
- Persentase Pendampingan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran;

## 5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program / Kegiatan satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut :

### ❖ ***Kota Palembang.***

Terdapat 25 Kegiatan yang dilaksanakan di kota Palembang antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Fasilitas Kunjungan Tamu
10. Pengadaan Mebel
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18. Pencegahan Gangguan Kentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
19. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
20. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi
21. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
22. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
23. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
24. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
25. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

### ❖ ***Palembang dan Kab/Kota di Wilayah Sumsel dan Luar Daerah :***

Terdapat 23 kegiatan yang dilaksanakan di kab/kota di wilayah Sumsel, antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
9. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
12. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
13. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
14. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
15. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
16. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
17. Pengembangan kapasitas dan Karier PPNS
18. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
19. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
20. Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
21. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Operasi Penegakan Produk Hukum Daerah
22. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
23. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 001/SE/BAPPEDA/2017 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta sebagai bahan masukan OPD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

## II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN I INI

Hasil evaluasi pelaksanaan program / kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I Ini pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut: **Rp. 40.687.783.398,-**

Tabel : Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

| Uraian                              | Pagu Anggaran (Rp)      | Realisasi Anggaran (Rp) | Keuangan (%)               |                               | Fisik (%)                  |                               |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                     |                         |                         | Target s.d. Triwulan I (I) | Realisasi s.d. Triwulan I (I) | Target s.d. Triwulan I (I) | Realisasi s.d. Triwulan I (I) |
| (1)                                 | (2)                     | (3)                     | (4)                        | (5)                           | (6)                        | (7)                           |
| <b>Total Belanja</b>                | <b>40.687.783.398,-</b> | <b>7.671.138.180,-</b>  | <b>25</b>                  | <b>18,85</b>                  | <b>25</b>                  | <b>25,07</b>                  |
| <b>Belanja Operasional</b>          | <b>39.981.160.988,-</b> | <b>7.671.138.180,-</b>  | <b>25</b>                  | <b>19,18</b>                  | <b>25</b>                  | <b>26,00</b>                  |
| - Belanja Pegawai                   | 27.211.971.000,-        | 6.656.199.880,-         | 25                         | 24,46                         | 25                         | 30,00                         |
| - Belanja Barang dan Jasa           | 12.769.189.988,-        | 1.014.938.300,-         | 25                         | 7,94                          | 25                         | 15,00                         |
| <b>Belanja Modal</b>                | <b>706.622.410,-</b>    | <b>0,-</b>              | <b>25</b>                  | <b>0</b>                      | <b>25</b>                  | <b>0</b>                      |
| - Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 306.622.410,-           | 0,-                     | 25                         | 0                             | 25                         | 0                             |
| - Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 400.000.000,-           | 0,-                     | 25                         | 0                             | 25                         | 0                             |

a) Realisasi Pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan :

### 1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 7.671.138.180 atau 18,85% dan realisasi Fisik 25,07%.

### 2) Realisasi Belanja Operasional (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa)

Realisasi Keuangan Belanja Langsung Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7.671.138.180 atau 19,18% dan realisasi fisik 26,00%.

### 3) Realisasi Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)

Realisasi Keuangan Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0 atau 0% dan realisasi Fisik 0 %.

b) Realisasi Keuangan

A. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0-65% :48 Kegiatan.

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 10 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 11 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 12 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 16 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 18 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 20 Pengadaan Mebel
- 21 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 22 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 25 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 27 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 28 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- 29 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
- 30 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi

- 31 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,  
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- 32 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan  
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- 33 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum  
dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
- 34 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka  
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 35 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- 36 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan  
Daerah dan Peraturan Gubernur
- 37 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan  
Gubernur
- 38 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan  
Gubernur
- 39 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan  
Daerah dan Peraturan Gubernur
- 40 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- 41 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan  
Penegakan Peraturan Daerah
- 42 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
- 43 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi  
Kebakaran
- 44 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
- 45 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 46 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah  
Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,  
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan  
Non Kebakaran
- 47 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku  
Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan,  
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan  
Non Kebakaran
- 48 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan  
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

B. *Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66-90% : 0 Kegiatan.*

C. *Tinggi, Kegiatan dengan realisasi 90-100% : 0 Kegiatan.*

#### c) Realisasi Fisik

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0 - 65 % : 48 Kegiatan.
2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66–90% : 0 Kegiatan.
3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi 90-100%: 0 Kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan Program / Kegiatan APBN di Provinsi Sumatera Selatan :

| K/L/Program/Kegiatan                                                                                                    | Pagu (Rp) | Realisasi (%) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|
|                                                                                                                         |           | Keuangan      | Fisik |
| Kementerian Dalam Negeri RI                                                                                             |           |               |       |
| Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Keg. Pembinaan Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat | Nihil     | Nihil         | Nihil |

a). Indikator Kinerja SKPD

- Indikator Kinerja SKPD berdasarkan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 :

| No  | Indikator Kinerja                                                      | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 5.1 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                           | %      | 95     | proses    | 0%      |
| 5.2 | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                  | %      | 100    | proses    | 0%      |
| 5.3 | Persentase Satlinmas yang aktif                                        | %      | 99     | proses    | 0%      |
| 5.4 | Persentase Pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | %      | 80     | proses    | 0%      |

### III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

*Kendala :*

- Perlunya dukungan OPD pemangku Perda dan Perkada.

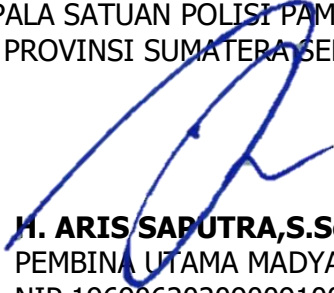
*Saran dan Tindak lanjut :*

- Perlunya dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

#### **IV. PENUTUP**

Demikianlah Penjelasan kami mengenai Program/Kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat di maklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, April 2025  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



**H. ARIS SAPUTRA, S.Sos, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV.d)  
NIP 196906202090091001